

## BAB II SEKITAR TERBENTUKNYA TENTARA ISLAM INDONESIA

### A. Sekilas Riwayat Kehidupan Kartosuwiryo

Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo atau yang dikenal dengan Kartosuwiryo bukanlah seorang pribumi yang berasal dari Jawa Barat. Kartosuwiryo lahir pada hari selasa kliwon tanggal 7 Februari 1905 di Cepu, Jawa Tengah.<sup>1</sup> Sewaktu kecil Kartosuwiryo akrab disapa dengan nama Sekarmaji, nama “Kartosuwiryo” sejatinya merupakan nama ayahnya.<sup>2</sup> Ayahnya berprofesi sebagai Mantri Candu, yakni seorang pegawai yang tugasnya menjadi perantara dalam jaringan distribusi candu siap pakai yang diusahakan dan dikontrol oleh pemerintah kolonial Belanda.<sup>3</sup> Dengan demikian sebagai seorang anak pegawai pemerintah, Kartosuwiryo hidup berpindah-pindah mengikuti tugas ayahnya. Melihat status sosial yang dimiliki orang tuanya itu maka keluarganya termasuk golongan yang cukup mampu secara finansial. Hal inilah yang membuat Kartosuwiryo dapat memperoleh pendidikan yang cukup di masa kolonial Belanda.

Kartosuwiryo mulai mendapat pendidikan formal pada tahun 1911. Pada waktu itu Kartosuwiryo masuk ke Sekolah “ongko loro” atau Sekolah Rakyat, sekolah yang diperuntukkan khusus bagi pribumi di desa tempat tinggal orang

---

<sup>1</sup> Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo*. Jakarta: Aryaguna, 1964, hlm 20.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ruslan, dkk. , *Mengapa Mereka Memberontak? Dedenglot Negara Islam Indonesia*. Yogyakarta: Bio Pustaka, 2008, hlm 3.

tuanya yaitu di Pamotan, Rembang.<sup>4</sup> Setelah menamatkan sekolah selama empat tahun, Kartosuwiryo melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Kelas Satu. Mula-mula Kartosuwiryo masuk ke Sekolah HIS (*Hollansch-Inlandsche School*) atau Sekolah Bumiputera Bahasa Belanda di Rembang. Kemudian pada tahun 1919, setelah kedua orang tuanya pindah ke Bojonegoro, Kartosuwiryo sekolah di ELS (*Europese Lagere School*) atau Sekolah Dasar Eropa di Bojonegoro. HIS dan ELS merupakan sekolah yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak priyayi atau bangsawan. Bagi para pribumi sekolah-sekolah ini merupakan sekolah elite dan tidak semua golongan pribumi dapat masuk karena syarat-syaratnya yang sangat ketat. Dengan demikian Kartosuwiryo sebagai seorang pribumi sangat beruntung sempat memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah elite tersebut.

Pada waktu di Bojonegoro Kartosuwiryo mulai mengisi masa remajanya dengan belajar mengenai pendidikan agama. Pendidikan agama ia peroleh dari seorang tokoh Muhammadiyah yang bernama Notodiharjo.<sup>5</sup> Pemikiran-pemikiran Notodiharjo yang merupakan tokoh Islam modern sangat mempengaruhi Kartosuwiryo dalam bersikap dan merespon ajaran-ajaran agama Islam.

Pada tahun 1923 Kartosuwiryo melanjutkan sekolahnya di NIAS (*Nederlandsch Indische Artsen School*) atau Sekolah Dokter Hindia Belanda di Surabaya. Selama di Surabaya ini Kartosuwiryo mulai aktif dalam politik. Awal

---

<sup>4</sup> Holk Harald Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo: Langkah Perwujudan Angan-angan yang Gagal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 7.

<sup>5</sup> Irfan S. Awwas, *Trilogi kepemimpinan Negara Islam Indonesia: Mengungkap Perjuangan Umat Islam dan Pengkhianatan Kaum Nasionalis-Sekuler*. Yogyakarta: USWAH, 2008, hlm. 351.

mula keaktifannya dimulai sejak ia memasuki organisasi Jong Java di Surabaya. Dalam organisasi ini ia dipercaya menjadi ketua Jong Java cabang Surabaya pada tahun 1924. Namun kemudian timbul perselisihan dalam tubuh organisasi Jong Java yang dipelopori oleh anggota-anggota yang lebih mengutamakan cita-cita keislaman. Mereka ini selanjutnya mendirikan organisasi baru dengan nama Jong Islamieten Bond pada tahun 1925. Kartosuwiryo pun pada akhirnya pindah ke organisasi yang baru itu dan tidak lama kemudian ia menjabat sebagai ketua cabangnya di Surabaya.<sup>6</sup>

Selama aktif di organisasi Jong Java dan Jong Islamieten Bond, Kartosuwiryo bertemu dengan beberapa tokoh ternama seperti H. O. S. Cokroaminoto dan H. Agus Salim, pemimpin PSI (Partai Sarikat Islam). Pandangan politik kedua tokoh tersebut terutama tentang cita-cita akan suatu Negara Islam, sangat mempengaruhi jalan pemikiran Kartosuwiryo. Selain itu Kartosuwiryo juga bertemu dengan pamannya yang bernama Mas Marko Kartodikromo, seorang wartawan dan sastrawan dari partai komunis. Kartosuwiryo kemudian memperoleh sejumlah buku bacaan sosialis dan komunis dari pamannya itu. Kedekatan Kartosuwiryo dengan pamannya ini pada akhirnya membuat Kartosuwiryo dikeluarkan dari sekolah NIAS pada bulan Januari 1927. Kartosuwiryo dikeluarkan setelah dirinya kedatangan memiliki sejumlah buku yang berkaitan dengan dua paham aliran tersebut.<sup>7</sup> Selain alasan tersebut, Kartosuwiryo

---

<sup>6</sup> Holk Harald Dengel, *op.cit.*, hlm. 8.

<sup>7</sup> Hersri Setiawan & Joebar Ayoeb. (1982). SM. Kartosuwiryo, Orang Seiring Bertukar Jalan, *Prisma*, No. 5 Tahun XI, hlm. 81.

juga dikeluarkan karena kegiatan politiknya di Jong Islamieten Bond sudah sangat terbuka.<sup>8</sup>

Hubungan antara Kartosuwiryo dengan pemimpin PSI, yaitu H. O. S. Cokroaminoto menjadi semakin akrab. Keakraban itu dimulai pada waktu Kartosuwiryo diangkat oleh H. O. S. Cokroaminoto untuk menjadi murid sekaligus menjadi sekretaris pribadinya pada bulan September 1927. PSI yang pada waktu itu dengan gigihnya menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda telah menarik perhatian Kartosuwiryo untuk terlibat aktif dalam partai PSI. Keaktifan dan hubungan dekatnya dengan salah satu pemimpin PSI itulah yang kemudian membuat Kartosuwiryo mulai banyak dikenal oleh kalangan PSI sekaligus menandai awal kariernya dalam PSI.

Pada waktu PSI atau disebut juga PSIHT (Partai Sarikat Islam Hindia Timur) mengadakan kongres pada bulan Desember 1927 di Pekalongan, Kartosuwiryo terpilih menjadi sekretaris umum dan harus tinggal di Batavia. Di Batavia ini Kartosuwiryo juga mulai bekerja sebagai wartawan pada redaksi *Fadjar Asia*, koran harian milik partai tersebut. Sebagai seorang sekretaris umum, Kartosuwiryo sering melakukan perjalanan guna mengunjungi cabang-cabang PSIHT di tiap-tiap daerah. Dalam kunjungannya itu, Kartosuwiryo sempat berkunjung ke daerah Malangbong, Garut, Jawa Barat. Di Malangbong ini Kartosuwiryo bertemu dengan *Ajengan*<sup>9</sup> Ardiwisastra, seorang tokoh PSIHT

---

<sup>8</sup> Corneles van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1983, hlm. 13.

<sup>9</sup> *Ajengan* (Bahasa Sunda) merupakan sebutan atau gelar bagi pemuka agama atau ulama seperti kiai.

setempat. Kartosuwiryo juga berkenalan dengan Dewi Siti Kalsum yang merupakan putri dari Ajengan Ardiwisastra. Dengan Dewi Siti Kalsum inilah Kartosuwiryo menikah dan pernikahan tersebut berlangsung di Malangbong pada bulan April 1929.<sup>10</sup>

Pada kongres PSI yang dilaksanakan akhir tahun 1929 di Batavia, Kartosuwiryo terpilih menjadi Komisaris Partai untuk daerah Jawa Barat yang berkedudukan di Malangbong, Garut, Jawa Barat. Dalam posisi yang demikian Kartosuwiryo akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang jurnalistik. Kartosuwiryo menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan secara pribadi dengan para ulama di Malangbong dan daerah-daerah lain seperti Priangan Timur. Di bawah bimbingan mertuanya dan para ulama yang lainnya,<sup>11</sup> Kartosuwiryo kemudian memperdalam pengetahuannya tentang agama Islam.

PSI mengubah namanya menjadi PSII (Partai Sarikat Islam Indonesia) Pada tahun 1930. Pada waktu PSII mengadakan kongres tahun 1936, Kartosuwiryo terpilih menjadi wakil ketua PSII mendampingi Wondo Amiseno yang diangkat menjadi Presiden Dewan Partai. Pada waktu itu dalam partai ini sedang dilanda konflik intern. Masalah pokok dari konflik tersebut ialah mengenai

---

<sup>10</sup> Holk Harald Dengel, *op.cit.*, hlm. 10.

<sup>11</sup> Tokoh ulama yang dimaksud antara lain yaitu Yunus Anis (Bandung), Yusuf Tausiri (Wanaraja) Mustafa Kamil dan R. Oni Qital (Tasikmalaya), Abdul Qudus dan Ghozali Tusi (Malangbong). Pinardi, *op.cit.*, hlm. 28.

sikap terhadap pemerintahan Belanda dan masalah *politik hijrah*<sup>12</sup>. Dalam tubuh PSII muncul pertentangan antara dua kelompok besar, yaitu antara Dewan Eksekutif dan Dewan Partai. Dewan Eksekutif dibawah pimpinan Abikusno Cokrosuyoso menginginkan partai tersebut tetap memperjuangkan politik nonkooperatif, yaitu menolak segala bentuk kerjasama dengan pihak Belanda. Namun di pihak lain, yaitu Dewan Partai yang dipimpin oleh H. Agus Salim menginginkan partai tersebut memperjuangkan politik kooperatif, yaitu cenderung pada sikap untuk bekerjasama dengan pihak Belanda.

Alasan yang diambil kelompok Agus Salim ini adalah kekhawatiran sehubungan pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat dalam membatasi kegiatan partai politik yang non-kooperasi. Sehingga, jika cara ini diteruskan, dikhawatirkan akan mempercepat keruntuhan partai. Oleh karena itu, ia mendesak supaya diadakan suatu *referendum* mengenai masalah tersebut.<sup>13</sup>

Setelah cara pemilihan pemimpin partai yang baru diberlakukan, yakni hanya memilih ketua partai maka pada akhirnya Abikusno Cokrosuyoso terpilih sebagai ketua partai PSII pada kongres partai ke-22 di Batavia bulan Juli 1936. Dengan demikian maka Abikusno Cokrosuyoso juga bertindak sebagai ketua formatur. Abikusno Cokrosuyoso diberi kekuasaan untuk memilih anggota-anggota pimpinan lainnya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Abikusno Cokrosuyoso untuk mengangkat Kartosuwiryo sebagai wakilnya. Dalam kongres tersebut diputuskan juga bahwa politik hijrah harus tetap diteruskan dan dijadikan

---

<sup>12</sup> *Politik Hijrah* merupakan salah satu cara yang digunakan oleh H. O. S. Cokroaminoto dalam menghindari politik pemerintahan kolonial Belanda dengan sikap non kooperasi, seperti yang dijalankan Gandhi di India. Politik ini kemudian menjadi strategi perjuangan PSII sejak 1923. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980, hlm. 159.

<sup>13</sup> Ruslan, dkk., *op.cit.*, hlm. 13.

sebagai haluan politik yang dianut oleh PSII. Oleh karena itu pada tahun 1936 inilah Kartosuwiryo diperintah oleh Abikusno Cokrosuyoso untuk menyusun brosur mengenai “Sikap Hijrah partai PSII”. Brosur ini selesai setahun kemudian, yang tersusun menjadi dua jilid dengan mengambil rujukan dari Al-Quran dan Hadits. Kemudian Abikusno Cokrosuyoso pun penyetujui dikeluarkannya brosur tersebut.

Segera setelah selesainya brosur tersebut, Abikusno langsung memberikannya pengantar dan menyatakan bahwa sejak diterbitkannya, brosur tersebut akan mempunyai kekuatan hukum bagi dunia PSII, sekaligus sebagai penentu gerak, langkah dan sikap yang wajib dijadikan pedoman bagi segenap anggota PSII untuk mengejar cita-citanya yang mulia.<sup>14</sup>

Sebagai tindak lanjut mengenai gagasan Kartosuwiryo maka dibentuklah suatu komisi yang harus menyusun Program Aksi Hijrah atau disebut juga Daftar Usaha Hijrah PSII pada kongres PSII ke-23 tahun 1937 di Bandung. Penyusunan program ini diputuskan juga dalam kongres partai di Surabaya pada tahun 1938.

Pada kongres tahun 1939 kebijakan politik hijrah kembali menimbulkan konflik yang melibatkan Kartosuwiryo dan mayoritas pimpinan PSII yang diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso. Abikusno Cokrosuyoso mengajak Kartosuwiryo untuk memutar haluan politik partai dengan bergabung ke dalam GAPI (Gabungan Politik Islam). Kartosuwiryo menolak ajakan tersebut dan tetap pada pendiriannya yang nonkooperatif itu. Selanjutnya Kartosuwiryo dan anggota sealirannya, diantaranya yaitu Jusuf Taujiri dan Kamran, memutuskan untuk membentuk suatu komite yang mempertahankan kebenaran PSII. Komite ini

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

bernama KPK PSII (Komite Pembela Kebenaran Partai Sarikat Islam Indonesia) dan diketuai oleh Kartosuwiryo.

Pada waktu PSII mengadakan kongres yang ke-25 di Palembang pada bulan Januari 1940, Kartosuwiryo dikeluarkan dari kepengurusan partai PSII. Dalam kongres itu PSII melarang anggota-anggotanya untuk memasuki komite yang telah dibentuk oleh Kartosuwiryo, yakni KPK PSII. PSII pun memutuskan untuk tidak lagi meneruskan program aksi hijrah dan membubarkan komisi yang sebelumnya ditugaskan untuk membuat program ini. Dengan demikian maka program PSII yang telah tersusun dengan baik itu tidak dapat terwujud melalui partai seperti yang telah direncanakan sebelumnya.

Setelah dikeluarkan dari PSII, Kartosuwiryo lebih menggiatkan aktivitasnya pada KPK PSII. Kartosuwiryo mengubah KPK PSII menjadi sebuah partai yang berdiri sendiri pada bulan Maret 1940 di Malangbong, Garut, Jawa Barat. Kartosuwiryo yakin bahwa partainya tersebut merupakan satu-satunya partai yang benar. Oleh karena itu anggaran dasar dan peraturan-peraturannya masih menggunakan anggaran dasar dan peraturan-peraturan PSII. bahkan pada sidang pertama KPK PSII, politik hijrah tidak saja diteruskan bahkan harus dilaksanakan dengan aksi yang lebih radikal.<sup>15</sup>

Pada awal berdirinya KPK PSII, anggotanya hanya tersebar di enam cabang PSII daerah Jawa Barat: “Pada sidang KPK PSII yang pertama dalam bulan Maret 1940 hanya enam cabang PSII yang lama dari Jawa Barat yang hadir,

---

<sup>15</sup> Corneles van Dijk, *op.cit.*, hlm 26.

yaitu Cirebon, Cibadak, Sukabumi, Pasanggrahan, Wanaraja dan Malangbong.”<sup>16</sup>

Dalam bulan itu juga setelah mendapat persetujuan dari partainya yang baru itu, Kartosuwiryo membuka lembaga pendidikan kader yang diberi nama Institut atau lembaga *Suffah*<sup>17</sup> di Malangbong, Jawa Barat. Kartosuwiryo memberikan pelajaran Bahasa Belanda, Ilmu Falak (astronomi), dan juga mengajarkan Ilmu Tauhid di lembaga Suffah tersebut.

Pada waktu Jepang tiba di Indonesia tahun 1942, Kartosuwiryo berusaha untuk mengembangkan partainya, yakni KPK PSII. Namun niat tersebut terhalangi oleh adanya kebijakan Jepang yang melarang adanya aktivitas politik bagi bangsa Indonesia terutama bagi umat Islam. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan KPK PSII yang berpusat di Malangbong itu dibubarkan oleh Jepang. Dengan dibubarkannya KPK PSII ini maka untuk sementara waktu Kartosuwiryo tidak terlalu aktif dalam bidang politik.

Kartosuwiryo kembali aktif dalam bidang politik mulai tahun 1943 dengan bergabung ke dalam organisasi MIAI (Majelis Islam A'laa Indonesia). Dalam organisasi tersebut Kartosuwiryo menduduki jabatan sebagai Sekretaris Majelis Baitul Maal, sebuah organisasi kesejahteraan dibawah MIAI.<sup>18</sup> MIAI kemudian

---

<sup>16</sup> Holk Harald Dengel, *op.cit.*, hlm. 22.

<sup>17</sup> Kata “Suffah” (Bahasa Arab) artinya membersihkan diri.

<sup>18</sup> Pembentukan Baitul Mal yang pertama, merupakan sebuah organisasi Islam yang otonom. Badan ini menerima zakat yang selanjutnya dibagikan kepada fakir miskin. Didirikan oleh Bupati Bandung bernama Wirana Kusuma tahun 1942. Tujuannya adalah untuk memperbaiki situasi ekonomi penduduk di daerah Priangan. H. J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, hlm. 179.

mengubah namanya menjadi Masyumi pada bulan Oktober 1943 dan sekaligus Kartosuwiryo diangkat sebagai Sekretaris Masyumi.<sup>19</sup>

Dalam masa pendudukan Jepang Kartosuwiryo tetap memfungsikan lembaga Suffah yang pernah dibentuknya. Namun lembaga tersebut kini lebih memfokuskan pada pembekalan pendidikan kemiliteran kepada siswa-siswanya.

Dalam sebagian besar penerbitan tentang *Darul Islam* dinyatakan, dalam masa pendudukan Jepang itu, ia berubah dari suatu lembaga yang memberikan pendidikan umum dan khusus menjadi lembaga pendidikan kemiliteran... banyak siswa yang menerima latihan kemiliteran di Institut Suffah akhirnya memasuki salah satu organisasi gerilya Islam yang utama sesudah perang, *Hizbu'llah* dan *Sabili'lillah*, yang akan menjadi inti Tentara Islam di Jawa Barat.<sup>20</sup>

Pada bulan Oktober 1945 Kartosuwiryo dan para anggota Masyumi yang lainnya seperti K. H. Wahid Hasyim dan Mohammad Natsir mengadakan pertemuan guna menentukan masa depan Masyumi.<sup>21</sup> Untuk merealisasikan gagasan itu maka Masyumi mengadakan sidang pertamanya di Yogyakarta tanggal 1 November 1945. Dalam sidang tersebut menetapkan bahwa Masyumi menjadi sebuah partai sekaligus merupakan wahana organisasi bagi semua kelompok Islam. Selain itu juga dalam sidang tersebut Kartosuwiryo diangkat

---

<sup>19</sup> Ruslan, dkk., *op.cit.*, hlm. 22.

<sup>20</sup> Cornelis van Dijk, *op.cit.*, hlm. 33.

<sup>21</sup> Kartosuwiryo, K. H. Wahid Hasyim dan Mohammad Natsir merupakan tokoh utama pendiri Masyumi. Ketiga tokoh tersebut menghendaki organisasi Masyumi dapat menghadirkan semangat Islam dalam perang kemerdekaan. Nugroho Dewanto, *Kartosowirjo: Mimpi Negara Islam*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2011, hlm. 28.

sebagai Sekretaris Pertama serta menetapkan Hizbullah dan membentuk Sabilillah sebagai laskar pertahanan partai Masyumi.<sup>22</sup>

Pada tahun 1947 Kartosuwiryo memutuskan untuk kembali ke Malangbong. Pada waktu itu Kartosuwiryo menjabat sebagai sekretaris pertama Masyumi dan sekaligus sebagai Komisaris Masyumi daerah Jawa Barat. Kartosuwiryo kemudian memindahkan kegiatan partainya itu ke Malangbong. Dari sinilah ia mulai mengkoordinasikan pasukan yang telah dibentuk oleh Partai Masyumi, yakni Hizbullah dan Sabilillah untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda.

## **B. Situasi dan Kondisi Jawa Barat Pasca Perjanjian Renville**

### **1. Letak dan Kondisi Geografis**

Jawa Barat terletak di bagian Pulau Jawa pada posisi 5°50'-7°50' Lintang Selatan dan antara 104°48'-108°48' Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia, di sebelah Barat dengan Selat Sunda, dan di sebelah Timur dengan wilayah propinsi Jawa Tengah.<sup>23</sup> Luas wilayah Jawa Barat ialah 46.890 km<sup>2</sup>. Jika dibandingkan dengan luas seluruh wilayah Indonesia dan luas wilayah Pulau Jawa, maka luas wilayah Jawa

---

<sup>22</sup> Holk Harald Dengel, *op.cit.*, hlm. 55.

<sup>23</sup> Intermassa, *Profil Propinsi Republik Indonesia Jawa Barat*. Jakarta: Intermassa, 1992, hlm. 27.

Barat sekitar 2,46 % dari luas seluruh wilayah Indonesia dan 27% dari pulau Jawa.<sup>24</sup>

Sebagian besar wilayah Jawa Barat merupakan daerah pegunungan. Sebagian dari gunung tersebut merupakan gunung berapi yang menjamin kesuburan wilayah itu. Jumlah gunung di Jawa Barat pun cukup banyak, seperti Gunung Rakata, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari yang letaknya di Banten hingga Gunung Ciremai di Majalengka. Ada juga Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango di daerah segitiga Bogor, Sukabumi dan Cianjur. Selain itu, di wilayah Priangan memiliki beberapa gunung yang meliputi Gunung Malabar di daerah Bandung, Gunung Cakrabuana di daerah perbatasan Sumedang, Tasikmalaya dan Garut; Gunung Cikuray, Gunung Galunggung, Gunung Talaga Bodas, Gunung Guntur, Gunung Sedakeling, Gunung Karacak, Gunung Mandalawangi, dan Gunung Haruman di daerah Garut. Ada juga Gunung Tampomas, Gunung Calancang di Sumedang, Gunung Bongkok di daerah Ciamis.

Sungai-sungai di wilayah Jawa Barat bermula dari wilayah pegunungan di pedalaman, kemudian mengalir melalui dataran rendah di sebelah utara dan barat serta celah-celah dataran tinggi selatan dan akhirnya bermuara di Laut Jawa, Selat Sunda dan Samudera Hindia. Sungai-sungai besar yang ada di wilayah Jawa Barat diantaranya yaitu Sungai Cisanggarung, Citarum, Cimanuk, Ciujung, Ciliwung, Cimandiri dan Citanduy.

---

<sup>24</sup> Edi S. Ekajati, *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995, hlm. 15.

Wilayah Jawa Barat juga dikenal sebagai daerah perkebunan, baik perkebunan tebu, kopi, karet, kina, teh maupun tanaman lainnya. Daerah perkebunan tersebut tersebar di daerah dataran rendah dan pegunungan di daerah Ciasem, Pamanukan, Bogor, Cirebon, Karawang, Indramayu, dan Priangan.<sup>25</sup> Perkebunan teh berada di sekitar Pangalengan dan Gunung Patuha, sedangkan perkebunan kina ada di Cinyiruan, Kabupaten Bandung. Ada juga perkebunan karet di Kabupaten Bandung, Tasikmalaya dan Ciamis.<sup>26</sup>

## **2. Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Masyarakat Jawa Barat hampir seluruh penduduknya merupakan penganut agama Islam dan dikenal sebagai penganut yang teguh. Sebagian besar dari mereka itu merupakan golongan Islam yang fanatik. Oleh karena itu, banyak tokoh-tokoh Islam Jawa Barat mengharapkan agar Negara Indonesia berdiri sebagai negara yang berdasarkan Islam. Sebagian besar penduduk Jawa Barat, terutama penduduk yang tinggal di pedesaan dan pegunungan, tergolong orang-orang yang berpendidikan rendah dan kurang mampu secara finansial. Penduduk Jawa Barat yang menetap di desa-desa dan pegunungan itu, pada umumnya terdiri dari petani-petani sederhana, baik sederhana dalam berpikir dan juga sederhana dalam tingkah lakunya. Kesadaran politik mereka pada waktu itu juga masih rendah. Demikian juga

---

<sup>25</sup> Disjarah TNI AD, *Penumpasan Pemberontakan DI/TII S. M. Kartosuwiryo di Jawa Barat*. Bandung: Disjarah TNI AD, 1985, hlm. 47.

<sup>26</sup> Nina H. Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 1998, hlm. 26-28.

kekuatan keuangan penduduk pada umumnya sangat berbanding terbalik dengan sebagian kecil kelompok penguasa. Sebagian besar penduduk Jawa Barat dengan keterbatasan keuangannya itu, tidak dapat menikmati kemewahan seperti apa yang dialami oleh sebagian kecil kelompok penguasa. Dimana kelompok penguasa mempunyai kecakapan berekonomi dan mempunyai hubungan dengan pedagang-pedangang besar di kota.

Di wilayah Jawa Barat banyak terdapat bangunan-bangunan masjid dan surau atau mushola, baik itu di kota-kota besar, kota-kota kecil maupun di desa-desa. Ada juga di beberapa daerah seperti Ciamis, Garut, dan Tasikmalaya banyak didirikan pesantren-pesantren yang merupakan pusat pendidikan agama Islam. Pada umumnya pesantren-pesantren tersebut berada di luar kota, bahkan banyak di luar kampung, seperti di daerah perbukitan atau lembah. Secara umum pesantren-pesantren di Jawa Barat memberikan pendidikan agama Islam secara intensif. Siswa pesantren atau santri yang jumlahnya ratusan itu, setiap satu bulan sekali diberi kesempatan untuk saling bertukar pikiran atau diskusi mengenai agama Islam dengan dibimbing oleh para kiai atau ulama setempat.

Para santri dalam prakteknya tidak hanya sekedar menjadi murid para kiai di pesantren, akan tetapi mereka juga dituntut untuk dapat mengharumkan nama kiai dan pesantren dimana ia menuntut ilmu. Bagi penduduk desa, para santri berperan sebagai mediator yang menyampaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat kepada kiai di pesantren tersebut. Sedangkan

kiai atau ulama biasanya memimpin sebuah pesantren sekaligus sebagai guru bagi santri-santrinya.

Guru-guru agama seperti kiai atau ulama secara terus menerus memupuk kekuatan mental kepada para santrinya dengan menanamkan paham perang sabil. Pada akhirnya paham perang sabil ini kemudian menjadi sikap hidup masyarakat Jawa Barat pada waktu itu. Pandangan hidup yang demikian itu, ditanamkan semenjak mereka kecil di pesantren-pesantren yang merupakan wahana pendidikan masyarakat, sehingga apabila masyarakat digerakkan untuk melaksanakan tugas itu maka akan mudah melakukannya.

### **3. Situasi Politik**

Politik pemerintah RI dalam rangka menanggulangi usaha penjajahan kembali Belanda pada tahun 1945-1949 yang berdasarkan pada politik diplomasi sering menimbulkan berbagai akibat yang negatif. Sikap politik pemerintah yang demikian itu sering mengabaikan faktor-faktor strategi militer, sehingga menimbulkan kerugian bagi RI. Beberapa politik diplomasi yang dilakukan pemerintah RI ternyata hanya memberikan kesempatan pada pihak Belanda untuk membangun kekuatannya kembali.

Politik diplomasi pemerintah RI mendapat tantangan dari berbagai golongan partai politik. Hal itu terbukti dengan reaksi yang timbul sesudah perjanjian Renville ditandatangani oleh pemerintah RI. Sebagian besar golongan partai politik menentang akan penandatanganan perjanjian

Renville.<sup>27</sup> Akibatnya Kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan digantikan oleh kabinet baru dengan Wakil Presiden M. Hatta sebagai Perdana Menteri.<sup>28</sup>

Situasi Pemerintah Pusat pada waktu itu didominasi oleh golongan politik tertentu. Dominasi pusat dalam bidang-bidang politik, militer dan ekonomi, tidak disukai oleh golongan partai politik yang ada di Jawa Barat, terutama Kartosuwiryo. Hal itu disebabkan karena Pemerintah Pusat sudah tidak lagi berfungsi, Pemerintah Pusat lebih berusaha untuk kepentingan golongannya. Keadaan yang semacam itu menimbulkan rasa tidak puas bagi Kartosuwiryo. Selain itu Kartosuwiryo juga merasa kecewa dan tidak puas dengan hasil perjanjian Renville, yang mengharuskan pasukan TNI dan laskar-laskar bersenjata lainnya di Jawa Barat *hijrah* ke daerah Jawa Tengah. Ia memilih untuk tetap bertahan di Jawa Barat untuk meneruskan perjuangannya melawan Belanda dengan cara gerilya.

Keputusan Renville yang mengharuskan pasukan TNI dan laskar-laskar bersenjata lainnya yang berada di wilayah pendudukan Belanda untuk melakukan *Hijrah* ke wilayah RI ternyata juga menimbulkan rasa tidak puas

---

<sup>27</sup> Partai-partai politik yang ikut dalam kabinet Amir Syarifuddin seperti PNI dan Masyumi secara resmi menolak hasil perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Amir Syarifuddin tersebut. PNI dan Masyumi menindaklanjuti penolakannya itu dengan menarik menteri-menterinya dalam kabinet Amir Syarifuddin. G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-2 bagian 2: dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai Pelita III*. Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 24.

<sup>28</sup> Untuk mengatasi kekacauan akibat perjanjian Renville, maka Sukarno menugaskan M. Hatta untuk membentuk suatu kabinet baru. Tanggal 29 Januari 1948, M. Hatta berhasil membentuk kabinet yang didominasi oleh Masyumi dan PNI. *Ibid.*

dikalangan militer RI, terutama laskar-laskar bersenjata yang ada di Jawa Barat. Laskar-laskar bersenjata yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut menolak untuk melakukan *hijrah*. Diantara laskar-laskar bersenjata yang menolak untuk melakukan hijrah adalah pasukan *Hizbullah* dan *Sabilillah*. Dengan melihat situasi yang demikian itu maka Kartosuwiryo berusaha mempengaruhi kedua pasukan tersebut. Pembinaan terhadap kedua pasukan itu dilakukan secara intensif agar mereka memihak kepadanya.

#### 4. Situasi Militer

Sesudah penandatanganan perjanjian Renville dilakukan, maka pada malam hari tanggal 17 Januari 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman telah memberikan perintah yang berisi sebagai berikut.<sup>29</sup>

- a. Menghindari provokasi berupa apa pun juga.
- b. Meneruskan tugas menjamin keamanan dan ketentraman dalam daerah-daerah yang menjadi tanggung jawab Angkatan Perang Republik Indonesia.
- c. Mempertahankan diri apabila diserang.
- d. Menghindari segala insiden.
- e. Angkatan Perang Republik Indonesia bertanggung jawab atas keamanan jiwa dan harta.

Sejak ditandatanganinya perjanjian Renville sebenarnya pihak militer RI kurang menyetujui hasil keputusan tersebut. Namun demikian TNI tetap

---

<sup>29</sup> Disjarah TNI AD, *op.cit.*, hlm. 24.

patuh dan setia terhadap keputusan pemerintah RI meski dengan perasaan yang berat. TNI yang telah menempati dan menduduki daerah-daerah yang strategis dikantong-kantong pendudukan Belanda diperintahkan untuk meninggalkan tempat-tempat tersebut.

Kesatuan-kesatuan yang berada di Jawa Barat tidak seluruhnya hijrah ke Jawa Tengah. Sebagian pasukan memilih untuk tetap berada di Jawa Barat untuk melakukan gerilya melawan Belanda. Kesatuan yang memilih tetap berada di Jawa Barat diantaranya yaitu pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Adapun eselon-eselon Divisi Siliwangi yang hijrah ke Jawa Tengah antara lain yaitu Batalyon Sitorus, Batalyon Ahmad Wiranatakusumah, Batalyon Kemal Idris, Batalyon A. Kosasih, Batalyon Rukman, Batalyon Darsono, Batalyon Lucas, Batalyon Sentot, Batalyon Sudarman, Batalyon Husinsyah, Batalyon Nasuhi, dan Batalyon Rivai.<sup>30</sup>

### **C. Terbentuknya TII**

#### **1. Latar Belakang Terbentuknya TII**

Pada tanggal 17 Januari 1948 telah ditandatangani Perjanjian Renville. Salah satu ketentuan dalam perjanjian itu yaitu mengharuskan pihak RI mengosongkan kawasan Jawa Barat dan Divisi Siliwangi harus ditarik ke Jawa Tengah. Pada waktu pengosongan dilakukan, mayoritas penduduk Jawa Barat sama sekali tidak mengerti mengapa Divisi Siliwangi yang mestinya melindungi dan mempertahankan daerah mereka dari Belanda malah

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

meninggalkan mereka. Penduduk Jawa Barat merasa seolah-olah ditinggalkan dan diserahkan begitu saja kepada Belanda. Dengan hijrahnya Divisi Siliwangi maka di Jawa Barat terjadi kekosongan unsur-unsur militer RI. Situasi tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Kartosuwiryo yang sudah sejak lama menginginkan terbentuknya suatu Negara Islam. Dengan segera Kartosuwiryo menyusun kekuatan untuk mewujudkan cita-citanya mendirikan NII, yakni dengan membentuk TII.

Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 1948 Raden Oni selaku komandan Sabilillah berangkat ke Peuteuynunggal, Garut, untuk berunding dengan Kartosuwiryo tentang masalah situasi politik dan militer yang berkembang sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian Renville. Keduanya sepakat bahwa pasukan-pasukan Islam harus tetap berada di Jawa Barat untuk melanjutkan perjuangan bersama-sama dengan rakyat melawan Belanda dan anggota-anggota Pasukan Sabilillah dan Hizbullah yang turut mengundurkan diri melakukan hijrah harus dilucuti senjatanya dengan damai atau dengan secara paksa. Keputusan lain yang sangat penting bahwa akan diadakan konferensi pada tanggal 10-11 Februari 1948 di Desa Pangwedusan, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya, dimana dalam konferensi itu harus hadir semua pemimpin Islam daerah Priangan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*. Jakarta: Darul Falah, 1999, hlm. 72.

## 2. Proses Terbentuknya TII

Atas anjuran Kartosuwiryo dan Raden Oni maka pada tanggal 10 Januari 1948, telah berkumpul wakil-wakil organisasi Islam yang masih bertahan di Jawa Barat untuk mengadakan konferensi yang akan berlangsung selama dua hari. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk menentukan sikap ummat Islam terhadap perjanjian Renville dan merundingkan mengenai cara bagaimana menentukan perjuangan selanjutnya. Konferensi dihadiri oleh 160 wakil-wakil organisasi Islam dan sebagian besar pengurus Masyumi daerah Priangan, para utusan dari Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung dan Sumedang. Diantara mereka yang hadir antara lain Kartosuwiryo sebagai wakil pengurus besar Masyumi untuk Jawa Barat, Kamran sebagai komandan teritorial sabilillah, Sanusi Partawidjaja sebagai ketua Masyumi daerah Priangan, Raden Oni sebagai pemimpin sabilillah daerah Priangan, Dahlan Lukman sebagai ketua GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia), Siti Murtaji'ah sebagai ketua Putri GPII, Abdullah Ridwan sebagai ketua hizbullah Priangan dan Saefullah sebagai ketua Masyumi cabang Garut, perwakilan dari Dewan atau Majelis Pertahanan Umat Islam Bandung dan Sumedang, masing-masing dua orang anggota, dan turut hadir pula perwakilan dari Dewan atau Majelis Pertahanan Umat Islam Tasikmalaya dan Ciamis, masing-masing 3 orang anggota.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Holk Harald Dengel, *op.cit.*, hlm. 65-66.

Dalam konferensi di Cisayong dihasilkan suatu keputusan penting, salah satu diantaranya yaitu mengenai pembentukan pasukan TII<sup>33</sup>. Keputusan lain mengenai pembentukan TII yaitu mengangkat Raden Oni sebagai pemimpin TII untuk daerah Priangan dan memberikan kekuasaan kepadanya untuk menyusun TII dalam waktu 3 bulan.<sup>34</sup> Penduduk diperintahkan untuk menyerahkan seluruh senjata yang mereka miliki kepada TII dan harus mengumpulkan uang untuk membeli senjata<sup>35</sup>. Selain itu apabila ada kesatuan militer yang tidak mau menyerahkan senjatanya secara sukarela, maka mereka ini akan dilucuti secara paksa oleh TII. Dengan demikian TII terbentuk dari gabungan pasukan Hizbullah dan Sabilillah serta semua organisasi Islam yang berada di Jawa Barat. Pada tahap ini TII telah terbentuk akan tetapi masih dalam taraf yang sederhana sehingga masih perlu diadakan perundingan-perundingan lain guna mencapai bentuk TII yang lebih riil sebagai suatu organisasi militer.

### 3. Sekilas Perkembangan TII

Pada tanggal 15 Februari 1948 diadakan suatu pertemuan khusus untuk melanjutkan perundingan mengenai pembentukan TII. Pertemuan ini

---

<sup>33</sup> Keputusan-keputusan penting lainnya dalam konferensi di Cisayong yaitu membekukan partai Masyumi di Jawa Barat, organisasi-organisasi Islam terutama yang terdapat di Jawa Barat dikoordinasikan menjadi satu wadah yang diberi nama Majelis Islam, dan mengangkat Kartosuwiryo menjadi Imam di seluruh umat Islam di Jawa Barat. Pinardi, *op.cit.*, hlm. 57.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Salah satu pedoman yang dipakai untuk mengumpulkan senjata tersebut ialah setiap desa diwajibkan untuk mengumpulkan sedikitnya 10 pucuk senjata. *Ibid.*

bertujuan untuk memberikan bentuk yang lebih konkret kepada TII. Dalam pertemuan tersebut Raden Oni diangkat menjadi Komandan Resimen TII. Selanjutnya Raden Oni memberikan nama resimennya ini dengan nama Resimen Sunan Rakhmat. Resimen Sunan Rakhmat terdiri dari empat batalyon, yaitu Batalyon I dikuasakan kepada S. Otong dari Bandung, Batalyon II dikuasakan kepada Haji Zainal Abidin dari Limbangan, Batalyon III dikuasakan kepada M. Nur Lubis dari Sumatera Barat dan Batalyon IV diserahkan kepada Adah Djaelani dari Singaparna.<sup>36</sup>

Pada awal terbentuknya, TII hanya memiliki sekitar 60 pucuk senjata ringan. Namun setelah kesatuan bersenjata di bawah pimpinan H. Zaenal Abidin, Adah Djaelani Tirtapradja, Agus Abdullah, Danu Mohammad Hasan dan kelompok-kelompok lainnya yang tidak ikut berhijrah ke Jawa Tengah mau bergabung dengan TII, situasi TII menjadi semakin baik.<sup>37</sup> Raden Oni menempatkan batalyon-batalyon resimennya ini di Gunung Cupu<sup>38</sup> di daerah Gunung Mandaladatar. Dengan demikian pada tahap ini TII telah mencapai bentuk yang konkret sebagai sebuah kekuatan militer dengan berhasil menyusun kekuatannya sampai satuan tingkat resimen.

---

<sup>36</sup> Holk Harald Dengel, *op.cit.*, hlm. 67.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Gunung Cupu adalah nama suatu desa yang terletak antara Tasikmalaya dan Ciamis, dan dilewati oleh sungai Citanduy. Bambang Imam Eka Respati Sabirin, "Lajur Kanan Sebuah Jalan: Dinamika Pemikiran dan Aksi Bintang Bulan (Studi Kasus Gerakan Darul Islam 1940-1962)". *Tesis*, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2003, hlm. 6.

Guna memperkuat pasukan tempur TII, pihak DI/TII mengadakan serangkaian konferensi lagi guna membahas mengenai bentuk TII yang lebih riil sebagai suatu kesatuan organisasi militer. Pada 1-2 Maret 1948 diadakan konferensi di Cipendeuy, Kecamatan Bantarujeg, Cirebon. Konferensi dihadiri oleh tokoh-tokoh utama DI/TII, seperti Kartosuwiryo, Kamran, Raden Oni, Ghozali Tusi, Sanusi Partawidjaja, dan Toha Arsyad. Konferensi juga dihadiri oleh semua pimpinan cabang-cabang Masyumi daerah Jawa Barat seperti dari Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Cirebon dan juga para komandan TII.<sup>39</sup>

Konferensi yang berlangsung di Cipendeuy, Kecamatan Bantarujeg, Cirebon bertujuan untuk meninjau dan merumuskan keputusan-keputusan konferensi di Cisayong. Salah satu rencana yang disahkan dalam konferensi ini ialah mengenai peleburan pasukan Hizbullah dan Sabilillah menjadi TII dan pembentukan Divisi TII. Keputusan berikutnya adalah Hizbullah Cirebon dilebur menjadi TII dan Kamran diangkat sebagai Panglima Divisi TII.

Pada tanggal 1-5 Mei 1948 diadakan konferensi yang ketiga di Cijoho, Kecamatan Bantarujeg, Cirebon. Konferensi yang berlangsung selama lima hari ini merupakan sidang Majelis Imamah<sup>40</sup> yang pertama. Dalam konferensi

---

<sup>39</sup> Holk Harald Dengel, *op.cit.*, hlm. 68.

<sup>40</sup> Majelis Imamah merupakan sebuah Kabinet yang berada dibawah pimpinan Kartosuwiryo selaku imam NII. Majelis Imamah terdiri dari lima kementerian yaitu: Majelis Penerangan dibawah pimpinan Toha Arsyad, Majelis Keuangan (Sanusi Partawidjaja), Majelis Kehakiman (Gozali Tusi), Majelis Pertahanan (S. M. Kartosuwiryo), dan Majelis Dalam Negeri (Sanusi Partawidjaja). *Ibid.*, hlm. 74.

itu Kartosuwiryo telah berhasil menyusun susunan ketentaraan NII, yakni TII. Susunan ketentaraan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>41</sup>

1. Kamran diangkat menjadi Panglima Divisi Syarif Hidayat.
2. Ibnu Khotieq diangkat menjadi Kepala Staf ketentaraan.
3. Urusan Umum ketentaraan dijabat oleh Danu Mohammad Hasan.
4. Raden Oni diangkat menjadi komandan Resimen Sunan Rakhmat.
5. M. Nur Lubis diangkat sebagai komandan Batalyon Kholid bin Walid.

Pada bulan Oktober 1949, organisasi NII mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Maklumat Komandemen Tertinggi No. 1, tanggal 3 Oktober 1949. Maklumat ini menetapkan perubahan-perubahan dibidang pertahanan. Menurut maklumat ini didalam tubuh NII hanya ada dua macam bentuk alat negara yang resmi, yaitu TII dan PII (Polisi Islam Indonesia).<sup>42</sup> Dengan demikian maka kesatuan-kesatuan bersenjata yang telah ada harus sebelumnya menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Kesatuan PADI yang secara berangsur-angsur telah menjadi kesatuan tentara, diubah sifat dan bentuk serta organisasinya menjadi TII.<sup>43</sup> Satuan penyidik yang dalam hal ini

---

<sup>41</sup> Dinas Sejarah Kodam VI Siliwangi, *Siliwangi dari Masa ke Masa*. Bandung: Angkasa, 1979, hlm. 471.

<sup>42</sup> S. M. Kartosuwiryo, "Pedoman Dharma Bakti Jilid I, Maklumat Komandemen Tertinggi Nomor 1, tanggal 3 Oktober tahun 1949", dalam Al-Chaidar, *op.cit.*, hlm. 561.

<sup>43</sup> *Ibid.*

merupakan bagian dari pasukan gestapu digabungkan ke dalam TII.<sup>44</sup> Dengan demikian tugas-tugas PADI dan gestapu kini dialihkan kepada TII<sup>45</sup>.

Pada tanggal 15 Januari 1950, pihak NII telah mengubah dan menyempurnakan angkatan perang TII. Sejak waktu itu susunan angkatan perang TII ialah sebagai berikut.<sup>46</sup>

1. Daerah Jawa Barat berada dibawah Divisi I Sunan Rakhmat, dengan panglimanya Raden Oni.
2. Daerah Jawa Tengah berada dibawah Divisi II Syarif Hidayat dengan panglimanya Kamran.
3. Divisi I Sunan Rakhmat mempunyai kekuatan 3 Resimen yaitu:
  - a. Resimen II Sapujagat dibawah pimpinan Haji Zaenal Abidin.
  - b. Resimen IV Kholid bin Walid pimpinan Adah Jaelani.
  - c. Resimen XII SJF dibawah pimpinan Agus Abdullah.

Dengan demikian itu TII telah mencapai bentuk yang sempurna sebagai sebuah organisasi militer. Kartosuwiryo telah berhasil membentuk pasukan TII sampai pada satuan tingkat divisi dengan dibekali persenjataan yang cukup memadai.

---

<sup>44</sup> Holk Harald Dengel, *op.cit.*, hlm. 119.

<sup>45</sup> Tugas PADI diantaranya melakukan penculikan dan aksi sabotase terhadap musuh, melaksanakan hukuman mati, melakukan penyerangan terhadap musuh dan bioskop di kota-kota yang diduduki oleh musuh. Sedangkan tugas gestapu ialah melakukan penyamaran ke dalam rumah tangga musuh dan menyusun daftar hitam yang berisi nama-nama orang yang dianggap menghalangi perjuangan NII. *Ibid.*

<sup>46</sup> Disjarah TNI AD, *op.cit.*, hlm. 111-112.